

PENGUATAN INDUSTRI KECIL BERBASIS WILAYAH

Sentra IKM Didorong Terus Tumbuh

YOGYA (KR) - Keberadaan sentra industri kecil dan menengah (IKM) bakal didorong agar terus tumbuh. Di samping memudahkan proses pendampingan, sentra IKM juga strategis dalam rangka penguatan industri kecil di wilayah.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperinkop UKM) Kota Yogya Tri Karyadi Riyanto, menyebut saat ini terdapat sekitar 30 sentra IKM yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Yogya.

"Salah satu tujuan dibentuk sentra adalah memudahkan dalam pembinaan IKM akan semakin berkualitas dan mempunyai daya saing," ujarnya, Senin (29/7).

Pihaknya saat ini juga akan mengevaluasi kembali keberadaan 30 sentra yang ada apa-

kah masih efektif atau tidak.

Menurutnya setelah dicermati dan dievaluasi kembali, keberadaan sentra-sentra IKM bukan tidak mungkin akan bisa diregruping berdasarkan jenis produksi maupun bahan bakunya.

Menurutnya, Disperinkop UKM tidak hanya membina dan mengevaluasi keberadaan sentra-sentra IKM yang ada namun juga melakukan pembinaan kepada empat calon sentra dan rintisan sentra IKM. Pembinaan dilakukan untuk mengawal agar rintisan

atau calon itu bisa menjadi sentra IKM di Kota Yogya.

"Kami juga memulai membina rintisan-rintisan sentra baik dari usulan wilayah maupun hasil pengamatan dan pembinaan ditemukan potensi ekonomi wilayah yang potensial dikembangkan kelembagaan menjadi sentra," imbuhnya.

Empat rintisan sentra yang dibina yaitu Natural Jogja dari Muja-Surju dengan produk kain ecoprint, Waru Craft dari Karangwaru produk kerajinan aksesoris, Kampung Jambu dari Suryatmajan produk olahan jambu air, dan kain ringkel dari Gondomanan. Rintisan sentra itu mulai digagas sejak tahun 2023 maupun tahun ini. Keempat rintisan sentra itu adalah hasil komu-

nikasi dengan wilayah ke- mantren dan kelurahan.

"Rintisan sentra itu tidak serta merta langsung kita deklarasikan menjadi sentra. Kita bina dan dampingi dulu melalui proses yang agak panjang," paparnya.

Ketua Tim Kerja Pembinaan Standardisasi Industri Disperinkop UKM Kota Yogya Heri Karuniawan, menambahkan rintisan sentra IKM dibentuk untuk memfasilitasi potensi-potensi sentra di wilayah. Seluruhnya pun belum diberikan surat keputusan walikota sebagai sentra IKM. Kriteria menjadi rintisan sentra antara lain terdapat potensi ekonomi di wilayah yang digeluti oleh sepuluh hingga lima belas pelaku IKM. Mereka berada dalam satu wilayah yang sama

serta memproduksi barang yang sama pula.

Tiap tahun Disperinkop UKM Kota Yogya membuka usulan rintisan sentra melalui musyawarah rencana pembangunan di wilayah.

"Para pelaku IKM yang tertarik jadi sentra IKM bisa mengusulkan ke dinas. Kami akan fasilitasi pembinaan kelembagaan sentra. Tapi para pelaku IKM harus membuat agyubun yang diketahui pemangku wilayah kelurahan dan kemantren. Rintisan sentra IKM juga kami fasilitasi untuk ikut pameran-pameran," jelas Heri.

Salah satu pelaku IKM dari rintisan sentra Kampung Jambu Suryatmajan Sumaryadi, menyambut baik dan merasakan manfaat dari pemben-

tukan rintisan sentra IKM. Dia bersama 18 pelaku IKM olahan jambu air di wilayah Kampung Jambu Gemblakan Bawah difasilitasi ikut dalam pameran seperti Pameran Seloka. Jambu air dipilih karena masyarakat Kampung Jambu banyak menanam pohon jambu air.

"Kita programnya dulu target satu KK satu produk olahan jambu air. Produknya ada sambel jambu, dodol jambu, eggroll jambu, keripik daun jambu, sirup jambu, stik jambu, ada cookies jambu, dan jambu rasa kurma. Yang kita harapkan dengan adanya rintisan sentra ini nanti lebih terkenal lagi. Wisatawan dan tamu-tamu pemkot bisa datang ke sentra," harapnya.

(Dhi)-d

ANTISIPASI PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Bawaslu DIY Cermati Daerah Rentan Konflik

YOGYA (KR) - Bawaslu DIY akan mencermati beberapa wilayah yang rentan dan berisiko terjadi konflik kepentingan atau pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu dikarenakan birokrasi pemerintah daerah, dalam hal ini ASN memang rentan dan berisiko tidak netral pada Pilkada. Kondisi itu mungkin terjadi ketika kepala daerah petahana maju kembali. Karena, bupati atau walikota statusnya merupakan pembina dari ASN sehingga dimungkinkan ada indikasi dukungan mendukung.

"Pejabat di daerah dalam posisi yang tidak mudah, ikut mendukung atau tidak. Kondisi itu yang membuat posisi pejabat atau ASN sangat rentan," kata Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib di Yogyakarta,

Minggu (28/7).

Mohammad Najib mengatakan, risiko pelanggaran soal netralitas ASN tidak hanya terjadi di tingkat jabatan yang tinggi. Tetapi kondisi itu juga bisa terjadi di level eselon, karena intervensi maupun garis instruksi di birokrasi pemerintahan sifatnya berjenjang, sehingga cukup rawan disalahgunakan. Guna meminimalisir terjadinya hal itu, Bawaslu DIY mencoba melakukan sejumlah antisipasi.

"Saat ini sudah memetakan Sleman yang bupatinya maju, wakil bupatinya maju dan mantan Sekda juga maju. Selain itu juga ada beberapa kabupaten yang kepala daerah petahana atau sekarang masih menjabat seperti Bantul dan Gunungkidul juga diisukan kembali maju.

Adanya kondisi itu menjadikan peta soal dukung mendukung sudah mulai kelihatan," terangnya.

Najib menambahkan, Bawaslu DIY menjalin koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait yang bisa ikut mengawasi dan menindak jika terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN. Apabila Bawaslu menemukan indikasi pelanggaran aparat pemerintah daerah yang tidak netral, maka akan diteruskan ke pihak terkait.

"Kami akan terus memperkuat mitigasi, risiko untuk melakukan upaya pencegahan. Karena yang penting dan perlu dilakukan adalah langkah yang dilakukan agar kekhawatiran itu tidak terbukti atau minimal terkontrol," ungkapnya. (Ria)-d

Pariwisata DIY Go International Perkuat Jejaring Melalui EATOF



KR-Istimewa

Ekowisata Sungai Oya di wilayah Selopamiro Imogiri Bantul, potensi yang masih tersembunyi.

YOGYA (KR) - Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi fokus Pemda DIY dalam mengembangkan pariwisata di DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X, dalam Governors Conference, THE 18TH East Asia Inter-Regional Tourism Federation (EATOF) General Assembly 2024 di Provinsi Tuv Mongolia, 26 sampai 28 Juli 2024, yang mengusung tema 'Bridging Global and Local'.

EATOF merupakan platform kerja sama pariwisata internasional yang dibentuk pada tahun 2000 oleh 9 provinsi di Asia Timur. Saat ini, EATOF merupakan satu-satunya lembaga pariwisata provinsi-provinsi di Asia Timur.

"Pariwisata yang berkualitas adalah fokus yang utama. Kami menawarkan pengalaman yang memperkaya, mendidik, dan transformatif. Investasi kami dalam infrastruktur, pelatihan, dan keterlibatan masyarakat bertujuan untuk memastikan standar layanan dan keberlanjutan yang tinggi," kata Sri Paku Alam X.

Dalam kesempatan tersebut, Paku Alam X menyampaikan, pariwisata, budaya dan pendidikan menjadi tiga pilar penting yang menjadi fokus perhatian. Karena ketiga pilar itu sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Batik, keris, Candi Prambanan, Sumbu Filosofis dan situs-situs yang terdaftar di UNESCO merupakan potensi besar pariwisata.

Keseluruhan potensi pariwisata tersebut merupakan ekspresi hidup dari budaya dan sejarah Yogyakarta.

"Selain potensi yang dimiliki, pemanfaatan teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan pengalaman wisata. Selain itu, pemerintah terus berupaya dan mendorong inovasi dan kreativitas, mengeksplorasi ekowisata, festival budaya, dan program pendidikan untuk tetap kompetitif," terangnya.

Wagub DIY mengungkap, pihaknya siap menantikan kolaborasi berkelanjutan dengan semua negara yang tergabung dalam EATOF untuk sukseskan Forum EATOF. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan di antaranya pelestarian warisan budaya, penawaran pengalaman berkualitas, merangkul inovasi digital, mendorong kreativitas, dan memastikan inklusivitas. "Semua dilakukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, menjadikan Yogyakarta sebagai mercusuar pariwisata budaya dan pendidikan," terangnya.

THE 18TH EATOF General Assembly 2024 memiliki beberapa rangkaian acara meeting. Di antaranya simposium yang diikuti oleh akademisi dari anggota EATOF, Bilateral talk antara Pemda DIY dengan Provinsi Gangwon, Tuv, Sebu, Totori, dan Sarawak. Kemudian, pada malam hari, acara dilanjut dengan welcome dinner.

(Ria)-d

SETAHUN MINIMAL TUNTASKAN 700 JIWA

Penanggulangan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan terus menggendong berbagai pihak dalam program penanggulangan kemiskinan. Aksi tersebut harus tepat sasaran serta tidak bisa jika hanya ditangani oleh unsur pemerintah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, menyebut selain mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pihaknya juga rutin melakukan update data kemiskinan.

Berdasarkan data dari BPS tingkat kemiskinan Kota Yogya di tahun 2023 sebesar 6,49 persen atau setara dengan 29.480 jiwa, sementara di tahun 2024 turun menjadi 6,26 persen setara dengan 28.790 jiwa.

"Artinya dalam setahun minimal terdapat 700 jiwa penduduk miskin yang bisa diantarkan. Harapan kami tentu bisa menasar lebih banyak lagi," tandasnya, Senin (29/7).

Secara berkala pihaknya juga melakukan evaluasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kota. Dari evaluasi tersebut harapannya setiap kendala yang sifatnya teknis hingga kebijakan bisa segera diantisipasi.

"Tentunya upaya pengentasan kemiskinan menjadi kerja bersama antar perangkat daerah, instansi vertikal juga pihak terkait yang dalam penganggaran, penyusunan program intervensi dan implementasi penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan basis data yang ada," katanya.

Menurutnya basis data

kemiskinan menjadi hal yang sangat penting untuk menampilkan data secara aktual, berdasarkan nama dan alamat sasaran intervensi. Sehingga program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan berjalan dengan optimal.

"Saat ini basis data sasaran kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kemudian yang sedang dalam proses adalah pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan ke depan-

nya akan mengoptimalkan aplikasi SEPAKAT sebagai alat dalam pelaksanaan intervensi," terangnya.

Sejalan dengan itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, menjelaskan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dalam pengentasannya harus melibatkan multiaktor dan multisektor.

Untuk itu Pemkot Yogya telah menerbitkan Keputusan Walikota (Kepwal) Yogyakarta Nomor 151 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Penang-

gulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2024-2025.

"TKPKD Kota Yogya memiliki struktur organisasi yang melibatkan antar perangkat daerah dan wilayah. Di dalamnya memiliki tiga ketugasan utama berkaitan dengan pengelolaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu. Kemudian pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, serta pengelola data dan sistem informasi," paparnya.

(Dhi)-f

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN		
Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, melalui jasa pralelang PT. Tritrimta Lelang Mandiri terhadap jaminan debitur : PT ATMA MULYA JAYA		
Objek Lelang	Nilai Limit	Jaminan Lelang
sebidang tanah seluas 1.813 m ² beserta segala sesuatu yang melekat dan tertanam di atasnya sesuai SHM No. 00599/Girisekar atas nama Zahra Pudra Mulya Nanda terletak di Jl. Panggang - Wonosari Desa Girisekar, Kec. Panggang, Kab. Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.	Rp.538.461.000,-	Rp. 178.400.000,-
Keterangan :		
• Nominal jaminan yang disetor ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.		
• Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.		
• Segala biaya yang timbul sebagai mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.		
• Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dapat dilihat sejak pengumuman diterbitkan. Syarat lainnya akan diumumkan pada saat pelaksanaan lelang. Keterangan lebih lanjut hub PT. Tritrimta Lelang Mandiri/ Yohanes Ardi Wijayanto 0812 2670 488.		
Deskripsi Persyaratan Lelang :		
• Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id		
• Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti dapat dilihat pada alamat website diatas.		
Deskripsi Pelaksanaan Lelang :		
Cara Penawaran	: Open Bidding (dengan mengakses url portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id)	
Hari/ Tanggal	: Selasa, 13 Agustus 2024	
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang sampai batas akhir penawaran	
Batas Akhir Penawaran	: 13 Agustus 2024 Pukul 14.00 (Sesuai Waktu Server)	
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran	
Pelaksanaan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi, serta uang jaminan disetor ke kas negara sebagai penerimaan lain-lain	
Bea Lelang Pembeli	: 2 % dari harga terbentuk lelang	
Tempat Pelaksanaan Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta.	
Jakarta, 30 Juli 2024		
td		
PT Tritrimta Lelang Mandiri	PT. Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia	

PROGRAM ARSIP MENYAPA

Ada 2 Juta Lembar Sejak HB I, Perlu 300 Tahun Tata Arsip Kraton Yogyakarta

YOGYA (KR) - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY kembali menggelar program Arsip Menyapa mengusung tema Arsip Kraton Yogyakarta. Menarik, muncul fakta begitu banyak arsip yang dimiliki Kraton Yogyakarta hingga 2 juta lembar dan membutuhkan sekitar 300 tahun untuk mengolah hingga melakukan digitalisasi arsip-arsip berusia ratusan tahun itu.

Kawedanan Widya Budaya menjadi pusat penyimpanan naskah dan arsip Kraton Yogyakarta. Terdapat ribuan layang, serat, babad, dan dokumen-dokumen kenegaraan yang diterbitkan sejak abad ke-18. Pengelolaan dan perawatan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjaga naskah-naskah tersebut dari kerusakan, terutama naskah yang memuat kunci-kunci sejarah dan mengandung nilai sastrawi tinggi. Naskah dan persuratan tertua yang ada di kraton berasal dari masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II (1792-1828).

KRT Chandra Ismaya Ningrat, Pemerhati Kearsipan, mengatakan di Kraton Yogyakarta sudah bekerjasama dengan DPAD DIY untuk melakukan pendataan kearsipan, penomoran, digitalisasi juga penjembaran dari huruf Jawa ke latin. Kraton berusaha mengamankan arsip yang harapannya awet hingga ratusan tahun mendatang. "Di Kraton saat ini



KR-Istimewa

Para nara sumber program 'Arsip Menyapa' yang kali ini mengangkat tema 'Arsip Kraton Yogyakarta'.

ada 2 jutaan lembar arsip. Kraton mendapat pendanaan dari Danaus untuk mengelolanya. Ada lima tim, satu tahun bisa mengelola 6 ribuan lembar arsip. Masih sedikit memang 6 ribu dibanding 2 juta. Jadi kota harus mengejar sampai 300 tahun lagi," ungkapnya dalam dialog daring tersebut.

Kawedanan Widya Budaya menurut Chandra melakukan pemilahan per kawedanan atau kedinasan di Kraton Yogyakarta untuk kemudian ditata dan dibuatkan daftar isi. Masyarakat menurut dia bisa mengakses arsip-arsip tersebut baik itu bidang pendidikan, maupun sejarah pemerintahan Kraton Yogyakarta. "Sudah banyak yang melakukan penelitian, jadi bisa diakses untuk arsip-arsip Kraton. Memang ada yang sifatnya tak boleh diakses untuk hal-hal tertentu. Namun untuk pendidikan, sejarah sangat bisa diakses

masyarakat," lanjutnya.

Sementara, Paniradya Pati Kautismawan Aris Eko Nugroho SP MSI, menambahkan pihaknya mempunyai ketugasan dalam keistimewaan meliputi sejarah dan asal-usul termasuk di dalamnya kearsipan Kraton dan Kadipaten Pakualaman. Diakui Aris, banyak arsip Kraton yang berada di Eropa baik Belanda maupun Inggris yang diambil pada masa penjajahan.

"Saya pernah melihat peta Yogyakarta lengkap dengan berbingin yang ada pada masa itu. Ini kita tidak punya. Harus ke luar negeri untuk melihat. Artinya, arsip harus kita kelola dan jaga sebaik mungkin. Mungkin hanya dianggap kertas tapi harapannya kini dinilai sebagai kertas yang berbicara. Tidak hanya statis tapi dinamis. Kami mendukung penyelamatan informasi-informasi yang pernah ada, dari

dua kelembagaan Kasultanan dan Kadipaten. Seturut aturan kedua lembaga berkolaborasi dengan DPAD dan kami menyediakan anggarannya. Pendanaan bisa melalui DPAD namun bisa juga ke kasultanan," tandas Aris.

Aris menilai sudah saatnya DIY mengejar keterlambatan pengelolaan arsip dari negara luar. Pihaknya menarget, arsip yang dipunyai bisa terselamatkan dan terkelola dengan baik, baik masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. "Arsip kita di luar negeri sudah ada yang dikembalikan, kalau government to government kadang ada kendala, tapi kalau dengan kasultanan menjadi lebih mudah. Ada 70-an naskah yang sudah dibawa ke kita. Harapannya arsip bisa kita jaga dan rawat dengan sebaik mungkin," tandasnya.

Tustiyan SH, Anggota Komisi D DPRD DIY, mengatakan DIY memiliki Perda nomor 5 tahun 2018 yang mengatur berbagai arsip di DIY. Perawatan arsip sangat penting dilakukan agar nantinya arsip bisa bercerita pada generasi selanjutnya.

"Untuk anggaran, kita sudah ada dan siap mensupport karena untuk merawat arsip ini tentu membutuhkan pendanaan. Kita ingin bahwa arsip-arsip yang ada bisa diolah dengan menarik dan nantinya bisa diketahui dengan lengkap oleh anak cucu kita," pungkasnya. (*)-d